

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS)

FADILAH MADJID



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FADILAH MADJID
A31112013**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS)

disusun dan diajukan oleh

FADILAH MADJID
A31112013

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 19 Oktober 2016

Pembimbing I,



Drs. Harryanto, PgD.Acc., M.Com., Ph.D
NIP. 19531210 198702 1 001

Pembimbing II,


Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si, CA
NIP. 19651018 199412 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196509251990022001

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS)

disusun dan diajukan oleh

FADILAH MADJID
A31112013


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **17 November 2016** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Harryanto, Pgd.Acc., M.Com., Ph.D	Ketua	1.....
2.	Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2.....
3.	Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.....
4.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Anggota	4.....
5.	Drs. M. Natsir Kadir, Ak., M.Si., CA	Anggota	5.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin Makassar



Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Fadilah Madjid
NIM : A31112013
departemen/program studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, November 2016
Yang Membuat Pernyataan



Fadilah Madjid

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Drs. Harryanto, Pgd.Acc., M.Com., Ph.D dan Bapak Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si, CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi saran literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Ir. H.M. Hatta Rahman, MM, selaku Bupati Kabupaten Maros atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Bapak dan Ibu kepala dan sekretaris badan, dinas, inspektorat, dan bagian yang memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti pada kantor Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Serta kasubag, bendahara dan staf di masing-masing SKPD yang telah memberi andil yang sangat besar dalam penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Allah *subhanahu wa Ta'ala* .

Terakhir, ucapan terima kasih kepada orang tua ,saudara-saudara, serta teman-teman atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagi pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, November 2016

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)

Analysis the Implementation of Accrual Accounting in the Local Government (Study in the Local Government of Maros)

Fadilah Madjid
Harryanto
Asri Usman

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah daerah, khususnya di tingkat unit kerja. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Populasi objek penelitian dalam hal ini adalah kepala sub bagian keuangan dan bendahara pada SKPD di Kabupaten Maros. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini juga menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah daerah sudah sangat baik. Khususnya tingkat implementasi akuntansi akrual dipengaruhi oleh ketersediaan sistem informasi serta kualitas sumber daya manusia. Namun, tidak ada pengaruh komitmen pelaksana dan pengembangan regulasi terhadap penerapan akuntansi akrual.

Kata Kunci: standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, komitmen, regulasi, Sistem Informasi, Sumber daya Manusia.

This study aims to provide an overview and empirical evidence regarding the implementation of accrual accounting in the local government, especially at the level of the working unit. Collecting data in this study using a questionnaire survey. The population of the research object in this case is managers and staff of the finance department of SKPD in the local government Maros. The data collected were processed using multiple linear regression analysis. This study also use classic assumption test and hypothesis test which is t-statistic test. The result of this study shows that the implementation of accrual accounting in the local government is excellent. In particular the level of implementation of accrual accounting is influenced by information system and the quality of human resources. However, there were no effects of management commitment and regulation against the implementation of accrual accounting.

Keywords: *accrual based government accounting standards, commitment, regulation, information system, human resources.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Teoretis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep	10
2.1.1. Teori Stewardship	10
2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan	11
2.1.3. PP 71 tentang SAP Berbasis Akrua	14
2.1.4. Peraturan Bupati Maros No.38 Tahun 2014	17
2.1.5. Peraturan Bupati Maros No.37 Tahun 2014	18
2.1.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	21
2.2. Laporan Keuangan SKPD	22
2.2.1. Laporan Operasional	23
2.2.1.1. Akuntansi Pendapatan-LO	25
2.2.1.2. Akuntansi Beban dan Belanja.....	27
2.2.2. Laporan Perubahan Ekuitas	29
2.2.3. Neraca	31
2.3. Penelitian Terdahulu	33
2.4. Kerangka Pemikiran	37
2.5. Hipotesis	38
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 44
3.1. Rancangan Penelitian	44

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
3.3. Populasi dan Sampel	44
3.4. Jenis dan Sumber Data	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data	45
3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45
3.6.1. Variabel Penelitian.....	45
3.6.2. Definisi Operasional Variabel.....	46
3.6.2.1. Komitmen Pelaksana	46
3.6.2.2. Pengembangan Regulasi	46
3.6.2.3. Ketersediaan Sistem Informasi	47
3.6.2.4. Sumber Daya Manusia (SDM)	48
3.6.2.5. Basis Akrua	49
3.7. Instrumen Penelitian.....	50
3.8. Analisis Data	51
3.8.1. Uji Validitas	51
3.8.2. Uji Reliabilitas	51
3.8.3. Uji Asumsi Klasik	52
3.8.4. Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Maros	53
4.1.2. Gambaran Sistem dan Prosedur Akuntansi	55
4.2. Deskripsi Data	59
4.3. Statistik Deskriptif.....	62
4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	64
4.5. Uji Asumsi Klasik.....	67
4.5.1. Uji Normalitas	67
4.5.2. Uji Multikolinearitas	68
4.5.3. Uji Autokorelasi.....	69
4.5.4. Uji Heteroskedastisitas	70
4.6. Uji Hipotesis	71
4.6.1. Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua	71
4.6.2. Pengaruh Pengembangan Regulasi terhadap implementasi SAP Berbasis Akrua	73
4.6.3. Pengaruh Sistem Informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua	74
4.6.4. Pengaruh kualitas SDM terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua	75
BAB V PENUTUP	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78
5.3. Keterbatasan Penelitian	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbandingan penjelasan L-O pada PSAP Nomor 01.....	24
2.2 Perbandingan penjelasan cakupan unsur LPE pada PSAP Nomor 01.....	30
2.3 Perbandingan cakupan unsur-unsur Neraca.....	32
2.4 Penelitian Terdahulu.....	33
4.1 Karakteristik Responden.....	60
4.2 Deskriptif Statistik	62
4.3 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian.....	63
4.4 Hasil uji validitas instrumen.....	65
4.5 Hasil uji reliabilitas instrumen.....	66
4.6 Nilai uji normalitas K-S Komitmen terhadap Akrua Basis	67
4.7 Nilai uji normalitas K-S Regulasi terhadap Akrua Basis	67
4.8 Nilai uji normalitas K-S IT terhadap Akrua Basis	67
4.9 Nilai uji normalitas K-S SDM terhadap Akrua Basis	68
4.10 Hasil uji Multikolinearitas	68
4.11 Hasil uji Autokorelasi	69
4.12 Hasil uji Heteroskedastisitas	70
4.13 Hasil Analisis Regresi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
2.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Basis Akrua)	18
2.3 Akuntansi dan Pertanggungjawaban	22
2.4 Kerangka Pemikiran.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata.....	85
2. Kuesioner.....	86
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	92
4. Hasil Analisis Berganda	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dasa warsa terakhir seiring dengan tuntutan akan peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai penyesuaian penatausahaan dilakukan demi mendukung perubahan tersebut. Salah satu kunci dalam perubahan tersebut adalah dikembangkannya kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dengan terbitnya SAP ini semakin mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan yang juga menandai dimulainya babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2010) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI. SAP Berbasis AkruaI terdapat pada lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI pada Lampiran II berlaku selama transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana tercantum dalam lampiran II dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis AkruaI, (PP No. 71 Tahun 2010)

Basis akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dianut oleh suatu entitas, yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui/dicatat dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Secara umum terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Namun dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, dikenal basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Akuntansi berbasis kas adalah suatu basis akuntansi yang mengakui transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya kas masuk dan kas keluar, serta diukur berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang

mengakui, mencatat dan menyajikan transaksi ekonomi serta peristiwa lainnya dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode (Suryo Adiprojo, 2015).

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat krusial dalam bidang pelaporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena merupakan tahun awal dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual. Dengan adanya wewenang yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah menggunakan basis akrual mulai tahun 2015. Penerapan basis akrual memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun tujuh komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan-Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. SKPD memiliki kewajiban untuk menyusun lima laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Meskipun sudah berbasis akrual, namun SKPD tetap menyusun laporan keuangan yang berbasis kas yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Sementara Komponen laporan keuangan berbasis akrual yang wajib disusun oleh SKPD adalah laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan

neraca. SKPD dalam prakteknya menjalankan dua siklus akuntansi sekaligus agar dapat menghasilkan keempat laporan keuangan tersebut, yaitu siklus akuntansi berbasis kas dan siklus akuntansi berbasis akrual.

Tidak terkecuali pada seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Maros selaku daerah otonom juga dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat. Hal tersebut karena pada tahun 2015 terjadi perubahan basis akuntansi Pemerintah Daerah kabupaten Maros, dari yang sebelumnya menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual basis*) menjadi sistem akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*).

Suksesnya penerapan PP No. 71 Tahun 2010 di sektor publik tentu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Khan dan Meyes (2009) menyampaikan bahwa untuk dapat berhasil dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ada empat kondisi yang harus disiapkan yaitu kesiapan sistem akuntansi, kebijakan pemimpin, kemampuan teknis dan adanya sistem. Surepno (2015) juga melakukan penelitian mengenai kunci sukses dan peran strategis implementasi akuntansi berbasis akrual. Hasilnya menunjukkan keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual Pemerintah Kota Semarang didukung oleh empat strategi utama yaitu komitmen pimpinan, pengembangan regulasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Surepno (2015) juga menganalisis respon pelaku implementasi terhadap peran strategis akuntansi berbasis akrual dalam transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku implementasi menunjukkan akuntansi berbasis akrual memiliki peran strategis dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Helen, Astuti, Diana Dwi (2013), namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak dari segi variabel independen yang mempengaruhi penerapan akrual basis (variabel dependent). Jika pada penelitian Helen, Astuti, Diana Dwi (2013) menggunakan variabel independent yaitu pemahaman, pelatihan, dan pendampingan aparatur pemerintah daerah, sementara dalam penelitian ini menggunakan variabel independent yaitu komitmen pimpinan, pengembangan regulasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia (Suprepno, 2015).

Penelitian ini mengambil unit satuan kerja di Pemerintah Kabupaten Maros sebagai ujung tombak pemerintah pusat di Daerah yang berkaitan langsung dengan setiap kegiatan teknis khususnya terkait proses pencatatan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi pada dinas terkait dan bagaimana Sumber Daya Manusia yang berperan di dalamnya memproses transaksi tersebut menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui kesuksesan Pemerintah Kabupaten Maros dalam implementasi akuntansi berbasis akrual melalui analisis terhadap respon pelaku implementasi akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Maros. Dengan ditetapkannya PP SAP berbasis akrual, diharapkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel guna terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah komitmen pelaksana berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ?
2. Apakah pengembangan regulasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ?
3. Apakah sistem informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sebagai berikut.

1. Pengaruh komitmen pelaksana terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2. Pengaruh pengembangan regulasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
3. Pengaruh sistem informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
4. Pengaruh Kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat, baik dari aspek teoretis maupun aspek praktis, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Dalam aspek teoretis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Bagi penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam aspek praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat praktis penelitian ini sebagai sumber informasi dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam memaksimalkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan meneliti penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Maros yang dipengaruhi oleh faktor komitmen pimpinan, pengembangan regulasi, ketersediaan sistem informasi, dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini hanya mengambil objek pada 15 SKPD yang merupakan Kantor Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Maros selaku entitas akuntansi.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, uji kualitas data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengujian data dimasukkan dalam persamaan analisis regresi dengan menggunakan program SPSS for windows dan pendeskripsian hasil kuesioner.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari hasil penelitian ini bagi SKPD Kabupaten Maros, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Stewardship*

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis dalam Haliah, 2012), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009 dalam Haliah, 2012) dan non profit lainnya (Vargas, 2004;Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010 dalam Haliah, 2012) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi

sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory* (Haliah, 2012).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya dengan melibatkan sejumlah aturan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, “standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-

Undang tersebut, maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan SAP. Dalam www.wikiapbn.com disebutkan:

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Menurut Sinaga dalam Faradillah (2013) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Laporan pokok menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penerapan atau pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan instansi pemerintahan merupakan hal wajib karena standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pelaporan. Entitas pelaporan terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah dan organisasi lainnya.

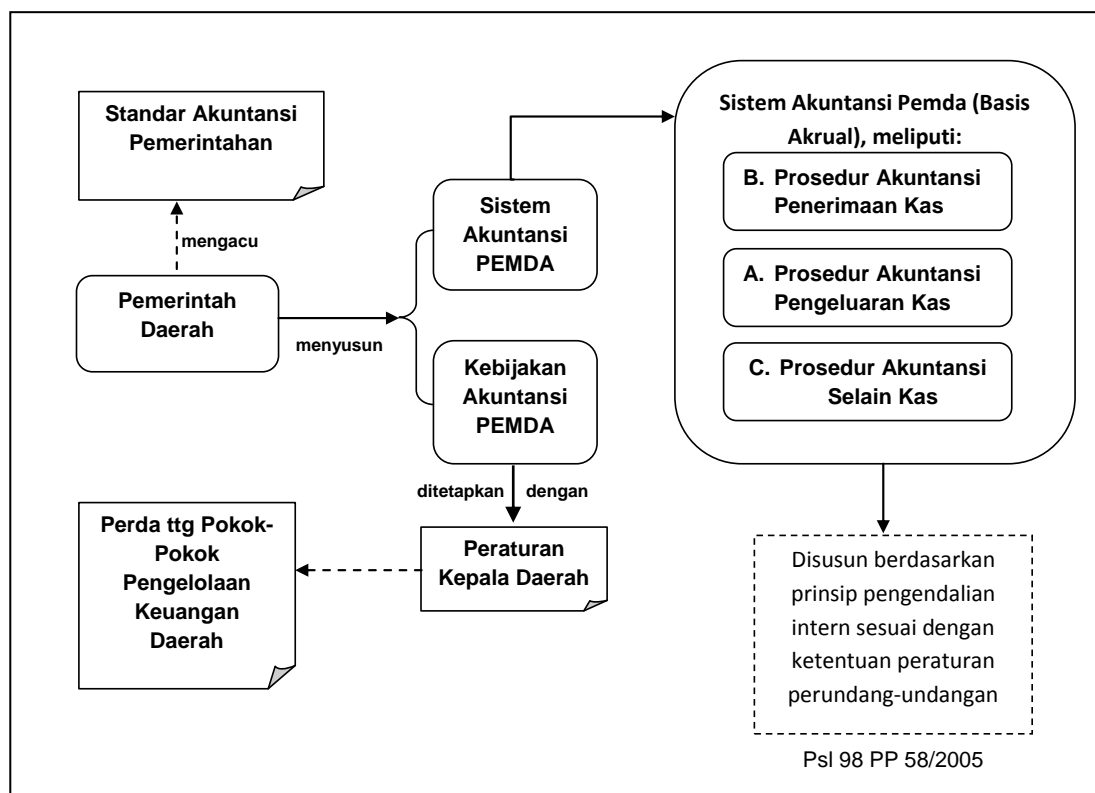
Menurut Fakhurrazi dalam Faradillah (2013), manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdiri dari:

1. Lampiran I. 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2. Lampiran I. 02. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
3. Lampiran I. 03. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
4. Lampiran I. 04. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
5. Lampiran I. 05. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
6. Lampiran I. 06. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
7. Lampiran I. 07. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
8. Lampiran I. 08. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
9. Lampiran I. 09. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

10. Lampiran I. 10. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
11. Lampiran I. 11. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
12. Lampiran I. 12. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
13. Lampiran I. 13. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Gambar 2.1 Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: BPKAD Kab. Maros- Akuntansi SKPD & Pelaporan Keuangan

2.1.3 PP 71 tentang SAP Berbasis Akrua

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau

pada saat perolehan, Bastian (2009). Khan dan Mayes (2009), mengartikan akuntansi akrual sebagai metodologi dalam akuntansi yang mengakui transaksi berdasarkan aktivitas ekonomi bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

Dengan dicetuskannya PP Nomor 71 Tahun 2010, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh organisasi pemerintahan untuk menerapkan basis akrual.

Berdasarkan pasal 36, ayat 1 UU Nomor 17 disebutkan :

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

SAP Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Beberapa negara sebenarnya kesulitan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrual ini dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- a. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
- b. SAP sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis “Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. Neraca yang disusun sebenarnya sudah berbasis akrual, walaupun Laporan Realisasi Anggaran masih berbasis kas.

- c. Para pengguna yang sudah terbiasa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya. Artinya, sebenarnya pengguna tinggal selangkah lagi untuk melaksanakan basis akrual secara penuh.

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas, Mardiasmo (2002). Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Kuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2014) dalam situs resminya pada modul penerapan akuntansi berbasis akrual menerangkan manfaat penerapan SAP berbasis akrual pada *Study* Nomor 14 yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detil dalam *Study* Nomor 14 tersebut dinyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat:

1. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya;
2. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya;

3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

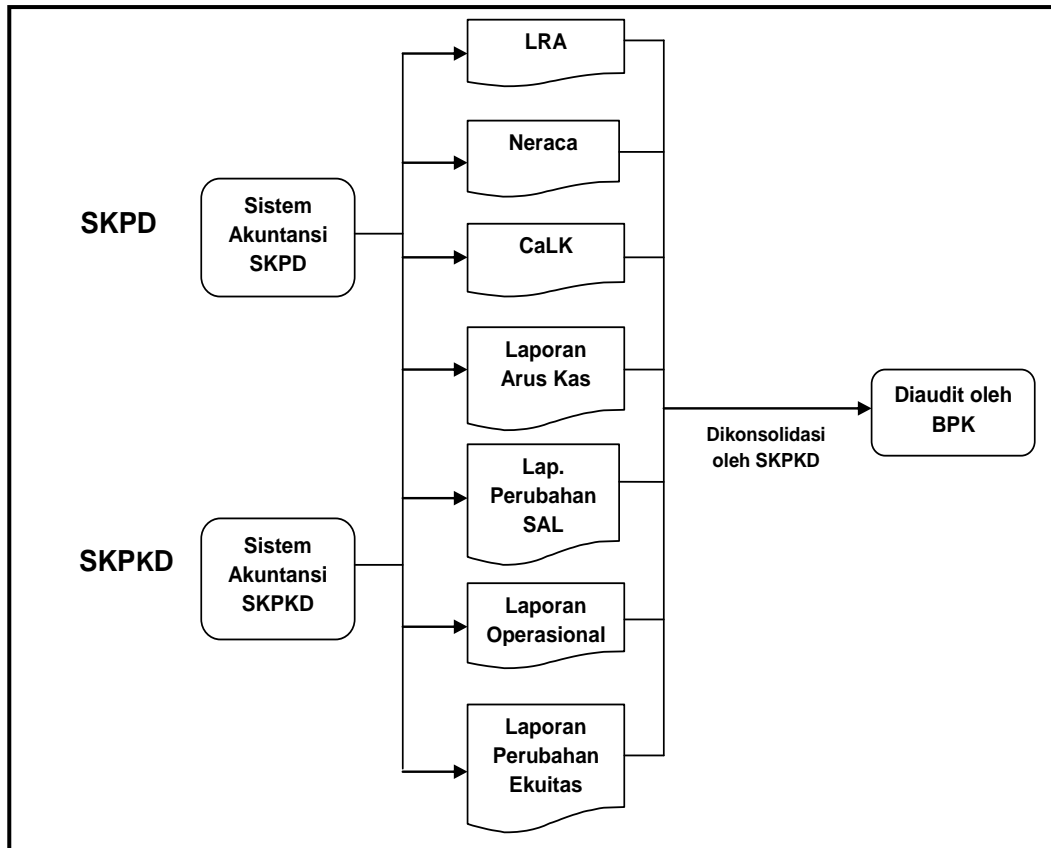
Manfaat dari penerapan SAP berbasis akrual ini tentunya mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pada laporan keuangan juga evaluasi pada kinerja pemerintah terutama terhadap sumber daya manusia.

2.1.4 Peraturan Bupati Maros Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- b. Sistem Akuntansi PPKD. Sistem Akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- c. BAS (Bagan Akun Standar). Bagan Akun Standar menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

Gambar 2.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Basis Akrual)



Sumber: BPKAD Kab. Maros- Akuntansi SKPD & Pelaporan Keuangan

2.1.5 Peraturan Bupati Maros Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal. Ruang lingkup kebijakan akuntansi ini terdiri atas:

- a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini membahas:
 - 1) tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi
 - 2) lingkungan akuntansi pemerintahan

- 3) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
 - 4) entitas akuntansi dan entitas pelaporan
 - 5) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum
 - 6) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi, dan
 - 7) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.
- b. penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya.
- Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
- (a) Laporan Realisasi Anggaran
 - (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - (c) Neraca
 - (d) Laporan Operasional
 - (e) Laporan Arus Kas
 - (f) Laporan Perubahan Ekuitas
 - (g) Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, kecuali:

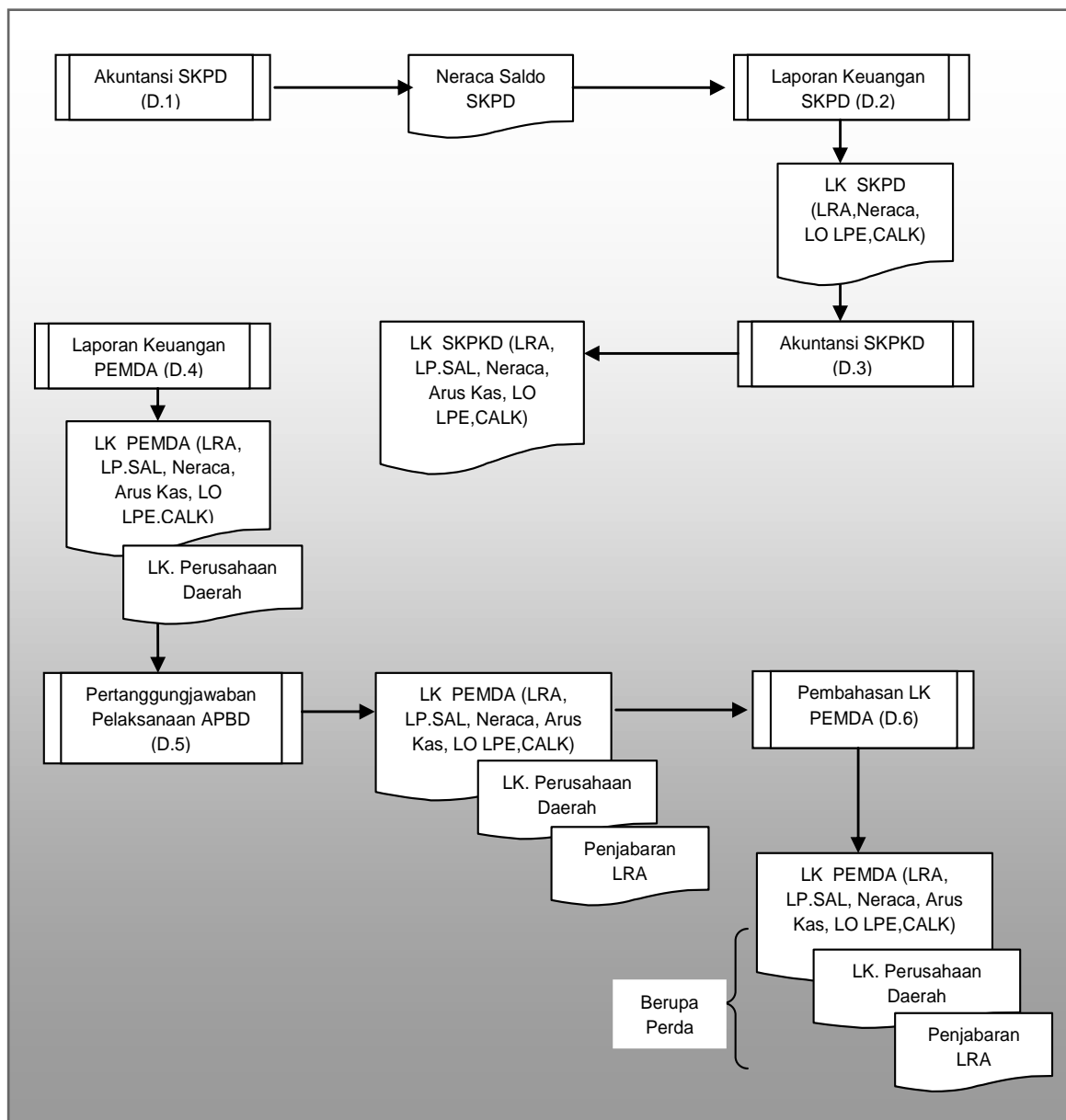
- a) Laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
- b) Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- c. laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - 1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat
 - 2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan
 - 3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. laporan operasional
- e. laporan arus kas
- f. catatan atas laporan keuangan
- g. akuntansi persediaan
- h. akuntansi investasi
- i. akuntansi aset tetap
- j. akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

- k. akuntansi kewajiban
- l. koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan
- m. laporan keuangan konsolidasian.

2.1.6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, berimplikasi pada perubahan sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. SKPD sebagai entitas akuntansi yang sebelumnya terbiasa dengan pencatatan berbasis kas harus merubah kebiasaan tersebut dan wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual mulai tahun 2015.

Tujuan penggunaan basis akrual adalah untuk memberikan informasi yang lebih akurat dalam pelaporan keuangan. Penerapan basis akrual memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun tujuh komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan-Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. SKPD memiliki kewajiban untuk menyusun lima laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Gambar 2.3 Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Sumber: BPKAD Kab. Maros. Proses_Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

2.2 Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor”. Di tingkat satuan kerja, pada akuntansi berbasis akrual ada 5 laporan keuangan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Neraca.
3. Catatan atas laporan keuangan.
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Perubahan Ekuitas.

2.2.1 Laporan Operasional

Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- (a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menjalankan pelayanan
- (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan keheatan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi
- (c) berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Maros dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif

- (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Tabel 2.1 Perbandingan penjelasan Laporan Operasional pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

PP 24/2005 : CTA	PP 71/2010 : ACCRUAL
Unsur Laporan Keuangan Laporan Kinerja Keuangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersifat optional (Paragraf 20 PSAP Nomor 01) 	Unsur Laporan Keuangan Laporan Finansial: Laporan Operasional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan Laporan Keuangan Pokok (Paragraf 14 PSAP Nomor 01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual ▪ Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: <ul style="list-style-type: none"> a) Pendapatan dari kegiatan operasional; b) Beban berdasarkan klasifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyajikan pos-pos sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> c) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; d) Beban dari kegiatan operasional ; e) Surplus/defisit dari Kegiatan

fungsional dan klasifikasi ekonomi; c) Surplus atau defisit. (Paragraf 95 PSAP Nomor 01)	Non Operasional, bila ada; f) Pos luar biasa, bila ada; g) Surplus/defisit-LO. (Paragraf 92 PSAP Nomor 01)
--	---

Sumber : keuda.kemendagri.go.id /Modul 1 – Konsep & Siklus Akuntansi Pemda

2.2.1.1 Sistem Akuntansi Pendapatan – LO

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi; potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak ketiga.

- a) PA/KPA. Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak.retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan
- b) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

- 1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan Neraca
- 2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya
- 3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan.

c) Bendahara penerimaan SKPD.

- 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan
- 2) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

d) BUD. Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan.

e) Pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah wajib pajak, wajib retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LO dan pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
- 2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- 3) Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
- 4) Surat Tanda Setoran (STS)
- 5) Bukti transfer/setor

- 6) Nota kredit bank
- 7) Bukti memorial
- 8) Bkti transaksi penerimaan kas lainnya

2.2.1.2 Sistem Akuntansi Beban dan Belanja

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Akuntansi beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/ lembur/ vakasi/ tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual.

1. Pihak Terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan pengesahan SPJ.

b. PPKD selaku BUD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

c. Bendahara Pengeluaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya.
- 2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- 3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang persediaan atau membuat SPP.
- 4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya.
- 5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK-SKPD.

d. PPK-SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.
- 2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuatkan memo jurnal.
- 3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/memo jurnal yang telah dibuat.
- 4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke buku besar.
- 5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun laporan keuangan.

e. Pihak Ketiga/ Pihak Terkait lainnya

Dalam kegiatan ini pihak ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari bendahara pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada akuntansi beban dan belanja SKPD meliputi sebagai berikut.

- 1) Berita acara serah terima (BAST) atau berita acara kemajuan pekerjaan
- 2) Surat tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan
- 3) Surat bukti pengeluaran/belanja
- 4) Surat pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran
- 5) Surat pengesahan pertanggungjawaban (SPPJ)
- 6) SP2D LS/GU/Nihil
- 7) Dokumen kontrak/perjanjian
- 8) Dokumen lainnya

2.2.2 Laporan Perubahan Ekuitas

Paragraf 82 kerangka konseptual SAP menjelaskan bahwa laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas hanya dikenal dalam akuntansi berbasis akrual. Dalam akuntansi *cash toward accrual* tidak dikenal adanya laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas berisi saldo awal ekuitas, yang diambil dari neraca awal tahun

anggaran, kemudian ditambah surplus atau dikurangi defisit, kemudian dipengaruhi oleh transaksi antar ekuitas.

Transaksi antar ekuitas adalah transaksi terkait realisasi DIPA (yang mirip dengan konsep penambahan modal dalam akuntansi komersial), dan realisasi penyeteroran PNBPN (yang mirip dengan transaksi prive dalam akuntansi komersial). Hasil akhirnya kita mendapatkan ekuitas akhir. Angka ekuitas akhir nantinya akan kita masukan dalam akun ekuitas yang ada di neraca akhir tahun. Adanya alur angka dari LO dibawa ke LPE, kemudian dibawa ke neraca menunjukan satu kaitan yang sangat erat antara satu laporan dengan laporan lain.

Tabel 2.2 Perbandingan penjelasan cakupan unsur Laporan Perubahan Ekuitas pada PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

PP 24 Tahun 2005 : <i>Cash Toward Accrual</i>	PP 71 Tahun 2010 : <i>Accrual basis</i>
<p style="text-align: center;">Unsur Laporan Keuangan</p> <p>Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersifat optional (Paragraf 20 PSAP Nomor 01) ▪ Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: <ul style="list-style-type: none"> a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; c) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 	<p style="text-align: center;">Unsur Laporan Keuangan</p> <p>Laporan Finansial:</p> <p>Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan Laporan Keuangan Pokok (Paragraf 14 PSAP Nomor 01) ▪ Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: <ul style="list-style-type: none"> a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya

kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. (Paragraf 95 PSAP Nomor 01)	dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir. (Paragraf 101 PSAP Nomor 01)
---	--

Sumber : keuda.kemendagri.go.id /Modul 1 – Konsep & Siklus Akuntansi Pemda

2.2.3 Neraca

Pada paragraf 64 kerangka konseptual SAP menjelaskan bawah Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca dijelaskan pada paragraph 65 yaitu terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Tabel 2.3 Perbandingan cakupan unsur-unsur Neraca pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, termasuk detail dari unsur-unsur ekuitas

PP 24/2005 : CTA	PP 71/2010 : ACCRUAL
<p style="text-align: center;">Unsur Laporan Keuangan</p> <p>Neraca</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aset ○ Kewajiban ○ Ekuitas Dana (Paragraf 59 Kerangka Konseptual) <p>Ekuitas dana yang terbagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih. ○ Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. ▪ Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Paragraf 78-81 PSAP Nomor 01) 	<p style="text-align: center;">Unsur Laporan Keuangan</p> <p>Laporan Finansial : Neraca</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aset ○ Kewajiban ○ Ekuitas (Paragraf 64 Kerangka Konseptual) <p>Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. (Paragraf 77 PSAP Nomor 01)</p>

Sumber : keuda.kemendagri.go.id /Modul 1 – Konsep & Siklus Akuntansi Pemda

2.3 Penelitian terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian terdahulu

No	Peneliti / Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Surepno (2015)	Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesuksesan Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini juga menganalisis respon pelaku implementasi terhadap peran strategis akuntansi berbasis akrual dalam transparansi dan akuntabilitas.	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dengan cara mewawancarai aktor kunci implementasi.	Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual Pemerintah Kota Semarang didukung oleh empat strategi utama yaitu komitmen pimpinan, pengembangan regulasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pelaku implementasi menunjukkan akuntansi berbasis akrual memiliki peran strategis dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan.
2.	Halen, Astuti, Dwi Diana (2013)	Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan <i>Accrual Basis</i> dalam Pengelolaan	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan aparatur Pemerintah	Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi beberapa metode (kuesioner,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (pemahaman, pelatihan, dan pendampingan) secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penerapan

		Keuangan Daerah di kabupaten jember (studi kasus pada dinas pemerintahan kabupaten jember)	Daerah terhadap penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember.	observasi, wawancara, dan studi pustaka). Data dianalisis dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda atau <i>Multiple linear Regression</i> .	basis akrual).
3.	Usman, Sunandar, dan Ida Farida (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai tingkat pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah daerah, terutama di tingkat unit kerja.	Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kuesioner . Populasi objek dalam penelitian dalam hal ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Ponorogo 2014. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan akuntansi akrual di Pemerintah masih sangat rendah. Khususnya tingkat implementasi akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun, tidak ada efek signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas konsultasi teknologi informasi, dukungan, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan ukuran unit kerja terhadap tingkat pelaksanaan akuntansi akrual.

4.	Ardiansyah dan Atmini, S (2012).	<i>Factors Affecting The Affecting The Readiness Of PP No.71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards (Case Study on Working Units in KPPN Malang's Working Area)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual	Metode penelitian yang digunakan menggunakan survei kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik uji regresi linier berganda, untuk melihat besarnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala interval atau rasio.	Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel kuliatas sumber daya manusia dan komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Namun Penelitian ini tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.
5.	Rizkianci, Anggi. (2016).	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelatihan, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	Jenis data adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan Rumus <i>Slovin</i> . Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner kepada 43 pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelatihan, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Variabel Pelatihan, Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan, tetapi Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

6.	Sampel, Kalangi, dan Runtu, T. (2015).	Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Manado dalam menerapkan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.	Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pimpinan dan pegawai dari bagian Akuntansi. Analisis Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Manado dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Manado diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
----	--	--	--	---	--

2.4 Kerangka Pemikiran

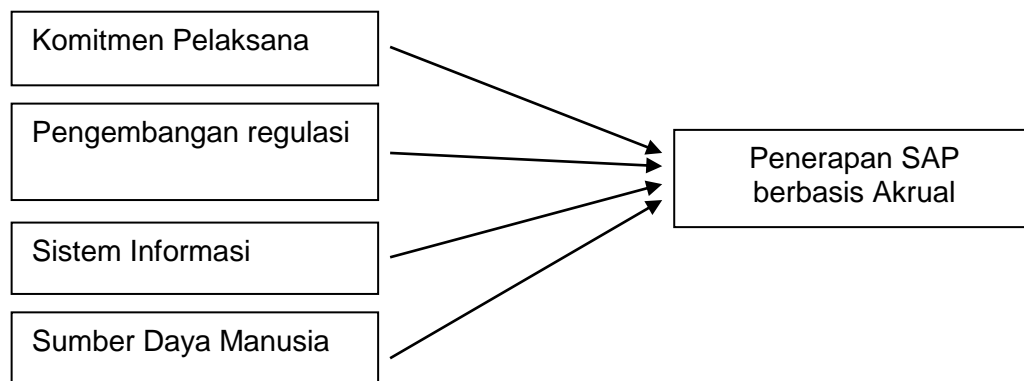
Penelitian ini menganalisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, pengembangan regulasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Bastian (2006), dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah (Humiang *et al*, 2015). Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 pasal 58 ayat 1 yang menyatakan:

“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.”

Dalam proses pelaksanaan akuntansi akrual, sumber daya manusia merupakan pilar penyangga sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha

mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan.

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Komitmen Pelaksana terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrua

Menurut Bastian (2006), dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

Buchanan dalam Azman, Tengku (2015) mendefinisikan komitmen adalah sebagai penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi (*identification*), keterlibatan secara psikologis (*psychological immersion*), dan loyalitas (*affection attachment*). Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong (*reinforce*) antara satu dengan yang lain. Selanjutnya Allen & Meyer

(dalam Dunham, dkk 1994) membedakan komitmen organisasi atas tiga komponen, yaitu:

1. Komitmen afektif (*Affective Commitment*), melibatkan rasa memiliki dan terlibat didalam organisasi.
2. Komitmen kontinuans (*Continuance Commitment*), dimensi komitmen ini atas dasar besar kecilnya pembiayaan yang akan ditanggung oleh karyawan jika meninggalkan organisasi. Tentu saja dalam hal ini erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan resiko yang akan diambarnya. Jadi yang menentukan komitmen adalah faktor rasional.
3. Komitmen normatif (*Normative Commitment*), komitmen ini lebih menekankan kepada keterlibatan perasaan dan menggambarkan dedikasi seseorang untuk tetap tinggal dan bekerja pada organisasinya.

Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, maka penerapan akuntansi pemerintahan memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah dan olehnya para staf yang terlibat didalamnya harus turut mengikrarkan komitmen mereka dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, untuk itu hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

H1: Komitmen pelaksana berpengaruh terhadap Penerapan SAP berbasis akrual.

2.5.2 Pengaruh Pengembangan Regulasi terhadap Penerapan SAP berbasis Akrua

Regulasi menjadi payung hukum dan panduan bagi pelaku implementasi untuk dapat mengaplikasikan perubahan sistem akuntansi dengan baik (Surepno, 2015). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 239 bagian kedua tentang kebijakan akuntansi disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang dimaksud merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Peraturan daerah tersebut sekurang- kurangnya memuat sebagai berikut.

- a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan
- b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa regulasi menjadi pedoman bagi pelaku implementasi untuk dapat menjalankan sistem baru. Dalam penerapan SAP berbasis akrual, Pemerintah Daerah harus mempersiapkan berbagai hal salah satunya adalah regulasi, yaitu penyesuaian regulasi Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan penerbitan Peraturan Kepala Daerah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

H2: Pengembangan regulasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

2.5.3 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Penerapan SAP berbasis Akrua

Dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual peran teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan. Menurut Turban, Rainer, & Potter (2007), *“Information technology infrastructure is the physical facilities, IT components, IT services, and IT personnel that support the entire organization.”* Calliueot dan Lapayre dalam Handayani (2007) menyatakan bahwa penciptaan suatu informasi yang efektif membutuhkan suatu pengorganisasian untuk mengembangkan sejumlah sistem-sistem pendukung. Penarikan staf yang kompeten dan layak adalah suatu tindakan yang sangat penting. Investasi yang besar dalam perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung sistem yang lain adalah sesuatu yang penting, namun tanpa manusia bersumber daya yang kompeten untuk mengkoordinasikan sistem akan menghasilkan informasi yang tidak layak, tidak tepat waktu atau tidak akurat. Kualitas suatu informasi tergantung dari beberapa hal yaitu akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan dapat dimengerti.

Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan sebagai alat kontrol yang menghasilkan informasi internal. Rostami dan Mongadam (2010) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan.

BPKP dalam hal ini memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah program aplikasi komputer yang diberinama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) yang mulai diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006. Program aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H3: Sistem Informasi berpengaruh terhadap Penerapan SAP berbasis akrual.

2.5.4 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan SAP berbasis Akrual

Menurut Wibowo (2007) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki

keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi 2005). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri, 2010). Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Selain itu, menurut Bastian (2006), pada saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan telah diterapkannya akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H4: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan suatu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam melakukan langkah-langkah praktis terhadap suatu obyek yang menjadi permasalahan. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara yang satu dengan variabel yang lainnya yang bukan merupakan sebab dan akibat, pendekatan yang memberikan suatu gambaran permasalahan untuk mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y (Indriantoro dan Supomo, 2002). Penelitian ini bersifat kuantitatif karena menggunakan data yang memerlukan perhitungan menggunakan *software* SPSS dan menggunakan analisa kualitatif untuk mendeskripsikan data-data yang sudah diperoleh sehingga akan lebih jelas.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu Kantor Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Maros yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni selama kurang lebih 3 minggu.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pegawai yang menangani keuangan yang berjumlah 39 orang yang terdapat pada 15 Dinas di Pemerintah Kabupaten Maros. Pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh. Adapun

kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer penelitian ini berasal dari jawaban responden melalui pertanyaan kuesioner sedangkan data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh peneliti berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Model pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian survei karena dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer menggunakan pertanyaan tertulis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti. Menurut Sekaran dan Bougie (2011:197) ketika kuesioner diantar dan diambil sendiri memiliki manfaat, yaitu pengambilan datanya lebih cepat dan apabila ada pertanyaan dari kuesioner yang sulit untuk dipahami, peneliti dapat menjelaskannya sehingga tingkat *error* data berkurang.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variable independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan akrual basis (Y), yang menjadi variabel

independen dalam penelitian ini adalah komitmen pelaksana (X1), pengembangan regulasi (X2), sistem informasi (X3), dan kualitas sumber daya manusia (X4). Pengukuran variabel menggunakan skala *Likert* yaitu responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro, 2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = Netral , Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

3.6.2.1 Komitmen Pelaksana

Komitmen merupakan motor penggerak dalam menerapkan kebijakan sehingga dapat menyumbangkan sesuatu terhadap organisasinya. Buchanan dalam Azman, Tengku (2015) mendefinisikan komitmen adalah sebagai penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi (*identification*), keterlibatan secara psikologis (*psychological immersion*), dan loyalitas (*affection attachment*). Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong (*reinforce*) antara satu dengan yang lain. Komitmen organisasi diukur dengan indikator penerimaan atas tujuan nilai-nilai organisasi, rasa memiliki terhadap organisasi, keterlibatan dalam organisasi secara utuh, loyalitas terhadap tujuan organisasi, profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi beban tugas dan tanggung jawabnya, serta memperhitungkan *benefit* yang diperoleh.

3.6.2.2 Pengembangan Regulasi

Regulasi menjadi pedoman bagi pelaku penerapan untuk dapat menjalankan sistem baru. Dalam penerapan SAP berbasis akrual, Pemerintah

Daerah harus mempersiapkan berbagai hal salah satunya adalah regulasi, yaitu penyesuaian regulasi Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan penerbitan Peraturan Kepala Daerah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dari beberapa teori-teori tersebut di atas, disimpulkan implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
3. Adanya hasil kegiatan.

3.6.2.3 Ketersediaan Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. sistem informasi harus betul-betul tersedia dan mampu dipergunakan oleh pemerintah

dalam melaksanakan SAP *accrual*. Kualitas suatu informasi tergantung dari beberapa hal yaitu (Mukhtar, 2002) akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan dapat dimengerti.

Sistem informasi juga harus didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang tepat. Menurut Jurnal & Supomo (2002) untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Konstruk Pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator sebagai berikut.

1. Perangkat ; ketersediaan komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas, jaringan internet yang telah terpasang pada unit kerja, jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan, proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
2. Pengelolaan data keuangan; sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mampu beradaptasi dengan pengguna, mampu menyediakan data yang akurat, mampu menyediakan data yang saling terkait, adanya pelatihan untuk peningkatan kualitas pengguna, adanya pendampingan dalam operasional sistem informasi.
3. Perawatan; adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur, peralatan yang rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

3.6.2.4 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Azman, Tengku (2015), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau

tertuang dalam deskripsi jabatan. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Variabel sumber daya manusia diukur dengan indikator SDM yang dimiliki berkualifikasi dengan jumlah yang cukup, SDM yang ada telah memiliki uraian tugas yang jelas, peran dan tanggung jawab SDM yang ada telah ditetapkan dengan jelas dalam peraturan daerah, uraian tugas telah sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya, Terdapat pedoman dan prosedur dan proses akuntansi, SDM yang ada telah melaksanakan proses akuntansi, terdapat SDM pendukung operasional yang memadai, pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian telah dilakukan, dana-dana telah dianggarkan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan.

3.6.2.5 Basis akrual (*accrual basis*)

Menurut pasal 1 ayat (8) PP No. 71 Tahun 2010 bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Menurut Tanjung (2012: 8) standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu : PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; PSAP 03 tentang

Laporan Arus Kas; PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan; PSAP 11 tentang laporan Keuangan Konsolidasian; PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian Evicahyani, Sagung Inten (2015) dan Tengku, Azman (2015) untuk variabel sistem informasi dan sumber daya manusia, pengukuran variabel komitmen pelaksana mengacu pada penelitian Surepno (2015), Tengku, Azman (2015) dan Rizkianci, Anggi. (2016) sedangkan Pengembangan regulasi mengacu pada penelitian Pinem, Ranin (2011) dan Sampel, Kalangi, dan Runtu, T. (2015). Penggunaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian tersebut cukup mewakili konteks penelitian terkait akrual basis dengan beberapa penyesuaian oleh peneliti. Pengukuran variabel menggunakan skala *likert* yang didesain untuk mengukur seberapa setuju atau tidak setuju subjek terhadap objek atau kejadian tertentu. Skala *likert* menggunakan lima angka penilaian, yaitu sangat tidak setuju (diberi poin 1), tidak setuju (diberi poin 2), netral (diberi poin 3), setuju (diberi poin 4) dan sangat setuju (diberi poin 5).

3.8 Analisis Data

3.8.1 Uji Validitas

Menurut (Efferin *et al*, 2008:118), uji validitas bertujuan untuk memastikan apakah semua data tersebut telah mengukur segala sesuatunya dengan tepat, dalam arti memang yang diukur adalah data yang dibutuhkan untuk menjawab *research questions*. Rumus yang digunakan adalah korelasi *Product moment* sebagai berikut :

$$R_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

R_{xy} = Pearson – r

$\sum x$ = Jumlah skor distribusi x

$\sum y$ = Jumlah skor distribusi y

$\sum xy$ = Jumlah perkalian skor x dan y

n = Jumlah responden yang mengisi kuesioner

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat skor distribusi x

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat skor distribusi y

Instrumen dikatakan valid apabila $r_{xy} > r$ dengan r tabel pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut (Efferin *et al*, 2008:118) uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan apakah data yang ada telah terukur dengan tepat dan tidak mengandung kesalahan material dari data yang diukur, proses pengukuran , maupun ukuran yang dipergunakan itu sendiri. Uji reliabilitas dilakukan dengan

Cronbach Alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai *cronbach alpha* > 0,70 (Ghozali 2011:49).

3.8.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan guna memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali 2011:58). Masalah multikolinearitas diuji dengan melihat *tolerance value* (kurang dari 0,1) atau nilai *variance inflation factor* (VIF, lebih dari 10) (Ghozali 2011:106).

3.8.4 Pengujian Hipotesis

Data dianalisis dengan metode Regresi Linear Berganda atau *multiple linear regression*, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu komitmen pelaksana (X1), pengembangan regulasi (X2), sistem informasi (X3), sumber daya manusia (X4), terhadap variabel dependen (Y) yaitu *accrual basis*. Bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda dalam aplikasinya adalah sebagai berikut (Supranto, 1996:272) :

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + e$$

Y = Penerapan *accrual basis*

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Komitmen pelaksana

X2 = Pengembangan regulasi

X3 = Sistem informasi

X4 = Sumber daya manusia

e = Error (kesalahan regresi)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri dari komitmen pimpinan, pengembangan regulasi, ketersediaan sistem informasi, dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan program SPSS versi 19.0. sebagai alat untuk menganalisis hubungan antar variabel. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa komitmen pelaksana tidak mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Atmini, S (2012) yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa komitmen pelaksana tidak berpengaruh secara signifikan
2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengembangan regulasi tidak mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sampel, Kalangi, dan Runtu, T. (2015) yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan penerapan akuntansi akrual karena penerapan tersebut merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut

didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Maros dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual.

3. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan sistem informasi memengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surepno (2015), Ardiansyah dan Atmini, S (2012) dan penelitian oleh Rizkianci, Anggi (2016) yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa ketersediaan sistem informasi sangat menunjang keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga hasil penelitian ini didukung.
4. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia memengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surepno (2015), Ardiansyah dan Atmini, S (2012) dan penelitian oleh Rizkianci, Anggi (2016) yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat menunjang keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga hasil penelitian ini didukung.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran yang dapat disampaikan untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang akan datang mengenai topik serupa sebaiknya melakukan *pre-test* terlebih dahulu untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan menggunakan indikator yang tidak valid sehingga data yang diperoleh memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan yang sesungguhnya.
2. Ruang lingkup penelitian sebaiknya diperluas lagi untuk meningkatkan populasi sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan SAP akrual yang lebih baik. Tidak hanya di satu lingkungan tertentu karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pelatihan aparatur Pemerintah Daerah disarankan agar dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan khususnya jika muncul peraturan pemerintah terbaru diharapkan secepat mungkin melakukan sosialisasi dengan SKPD yang ada.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan- keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian ini memiliki sampel 36 responden yang sedikit dan terbatas untuk populasi pelaksana teknis SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
2. Penelitian ini tidak mengambil sampel Bupati dan Kepala Dinas selaku pimpinan dan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menilai komitmen mereka dalam menerapkan SAP berbasis Akrual.

3. Ruang lingkup penelitian hanya di Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengakibatkan kurang dapat mewakili persepsi para pelaksana akuntansi akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
4. Keterbatasan yang melekat pada metode survei yaitu peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden apabila responden tidak jujur dalam menjawab pertanyaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18–30.
- Ardiansyah dan Atmini. 2012. Factors Affecting The Affectig The Readiness Of PP No.71 Tahun 2010 About Goverment Accounting Standards (Case Study on Working Units in KPPN Malang's Working Area). *Jurnal*.
- Azman, Tengku. 2015. Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumberdaya Manusia, Infrastruktur serta Sistem Informasi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruwal. *Jurnal Sorot 10 (1) LPPM Universitas Riau ISSN 1907-364X*, 131 – 142
- Bastian, I. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE) - Yogyakarta.
- Connolly, C. Hyndman, N. 2010. *Accrual Accounting in public sector : a road not always taken*. Makalah disajikan pada seminar Institute of Public Administration. IPA. Rome, 28-30 November.
- Dunham, R. B., Grube, J. A. and Castaneda, M. B. 1994. Organizational Commitment. The Utility of an Integrative Definition. *Journal of Applied Psychology*, Vol.79, No.3, pp.370-380.
- Efferin, Sujoko. 2008. *Mengungkapkan Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Evicahyani, Sagung Inten. 2015. *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan*. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana.
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Halen, Astuti, Diana Dwi. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan Accrual Basis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Jember (Studi Kasus pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Jember)*. Jurnal Ekonomi Mandala Jember.
- Haliah. 2012. *"Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya"*. Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar.
- Handayani, R. 2007. *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi*. <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting>. diakses tanggal 2 Januari 2016.
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. www.osc.state.ny.us. diakses tanggal 2 Januari 2016.
- Humiang,G.,P., Saerang, David P.,E., Karamoy, Herman, 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI serta Dampaknya terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol 6, No 2 (2015): Goodwill Vol. 6* No. 2 Desember 2015.
- Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Ti Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Volume 5, No.2, Mei: Hal. 214-228
- Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Modul 1 Konsep dan Siklus Akuntansi Pemda*. <http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akruaI>. Diakses tanggal 2 Januari 2016.
- Khan, A. dan Mayes, S. 2009. *Transition to Accrual Accounting*, (online), (<http://blog-pfm.imf.org/files/fad-technical-manual-2.pdf>. Diakses 2 Januari 2016.

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE, Yogyakarta
- Peraturan Bupati Maros Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros
- Peraturan Bupati Maros Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pinem. Morisem. Dany.2008. Skripsi : *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Karo*. FE USU : Medan
- Putri. 2012. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Pemda Kab. Bengkalis*. Skripsi. Universitas Sriwijaya, Bengkalis.
- Ririz, Setiawati Kusuma. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*. Skripsi diterbitkan. Jember: Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Salehi, M., V. Rostami, dan A. Mogadam. 2010. Usefulness of accounting information system in emerging economy: empirical evidence of Iran. *International Journal of Economics and Finance*. Vol.2 No.2 (May).

Sampel, Kalangi, dan Runtu, T. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 3(1).

Sekaran, Uma. dan Bougie, Roger. 2011. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach fifth edition*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Suprpto, J. 1993. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jilid I. Erlangga. Jakarta.

Surepno. 2015. *Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual*. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 7, No.2, pp. 119-128.

Usman, Sunandar, dan Ida Farida. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah*. Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta, Jawa Tengah : Indonesia

Uyanto, S. 2006. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Graham Ilmu.

Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wikiapbn. 2015. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi-pemerintahan/>. Diakses tanggal 2 Januari 2016.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Lampiran 1

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Fadilah Madjid
 Tempat, Tanggal lahir : Maros, 11 Desember 1994
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Jln. Dr. Ratulangi No. 54 B Maros
 Telpn Rumah dan HP : - / 082193198150
 Alamat *E-mail* : fadilahmadjid@gmail.com

Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

- SD Negeri 22 Bontokapetta, Maros (2000 – 2006)
- SMP Negeri 2 Unggulan Maros (2006 – 2009)
- SMA Negeri 1 Maros (2009 – 2012)

Riwayat Organisasi

a. Pengalaman Organisasi

- Koordinator Divisi Dana & Kesekretariatan Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi & Bisnis, Departemen Kemuslimahan Masjid Darul Ilmi (MDI) (Tahun 2014-2016)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, Juni 2016

Fadilah Madjid

Lampiran 2

KUESIONER

Kepada Yth.

**Bpk/Ibu Kasubag Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, dan
Bendahara Pengeluaran SKPD**

di

Tempat

Hal: **Mohon Partisipasi Menjadi Responden**

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang sementara melakukan penelitian mengenai **Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dilihat dari sudut pandang para staf pelaksana teknis akuntansi akrual pada SKPD selaku entitas pelaporan.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data/informasi dari Bpk/Ibu. Mohon partisipasi dari Bpk/Ibu sebagai pelaksana akuntansi akrual untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan persepsi Bpk/Ibu. Tidak ada jawaban yang **benar atau salah**, yang penting adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Semua data/informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Demikian, atas kesedian dan partisipasi Bpk/Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan Bpk/Ibu mendapat pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Makassar, Juni 2016

Peneliti

Fadilah Madjid

HP 082193198150

A. Identitas Responden

1. Tanggal Pengisian : _____
2. Nama Instansi : _____
3. Nama Responden : _____
4. No. Hp : _____
5. Jabatan : _____
6. Masa kerja : _____
7. Tahun Kelahiran : _____
8. Jenis Kelamin : ☐ Laki- laki ☐ Perempuan
9. Pendidikan formal terakhir : ☐ SMA ☐ Diploma
☐ Sarjana (S1) ☐ Pascasarjana (S2)
10. Latar belakang pendidikan formal (bidang ilmu/jurusan) : _____

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikut ini Bpk/Ibu akan diberikan sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Bpk/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi **checklist** (☒) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut.

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju STS	Tidak Setuju TS	Netral N	Setuju S	Sangat Setuju SS

a. Komitmen Pelaksana

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	1	2	3	4	5
1. Bpk/Ibu merasa terikat secara emosional dengan unit kerja dimana Bpk/Ibu bertugas.					
2. Bpk/Ibu merasa bangga melaksanakan tugas atau pekerjaan di Dinas terkait .					
3. Bpk/Ibu merasa tidak berkomitmen jika tidak memberikan kemampuan secara profesional dalam melaksanakan SAP berbasis akrual.					
4. Bpk/Ibu bersedia bekerja ekstra agar penerapan SAP berbasis akrual berhasil dan sukses.					
5. Bpk/Ibu melaksanakan SAP akrual dengan motivasi yang tinggi untuk memberikan kinerja yang baik.					
6. Bpk/Ibu disiplin dalam melaksanakan tugas dan menetapkan tujuan secara realistis.					
7. Bpk/Ibu memiliki kepuasan tersendiri apabila dapat menyelesaikan tugas yang sulit.					

b. Pengembangan Regulasi

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	1	2	3	4	5
1. Bpk/Ibu telah mengetahui dan memahami regulasi terkait pelaksanaan SAP berbasis akrual.					
2. Dari segi <i>content</i> (substansi dan ruang lingkup pengaturan), peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SAP berbasis akrual sudah cukup sesuai dengan tujuan SAP berbasis akrual, yakni menghasilkan laporan keuangan akrual dan memberi manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik bagi para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.					
3. Regulasi yang mengatur SAP berbasis akrual cukup mudah dipahami oleh Bpk/Ibu pengelola keuangan.					
4. Bpk/Ibu konsisten dalam menjalankan regulasi terkait SAP berbasis akrual.					
5. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah telah memuat definisi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan serta prinsip- prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan menjadi pedoman bagi Bpk/Ibu dalam menjalankan tugas.					

c. Ketersediaan Sistem Informasi

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	1	2	3	4	5
1. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
2. Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan secara komputerisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
3. Sub bagian pengelola keuangan memiliki komputer dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas.					
4. Jaringan internet telah tersedia dan terpasang pada unit kerja anda.					
5. Jaringan internet dan Jaringan komputer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan.					
6. Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kemudahan dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual.					
7. Laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, lebih cepat, mudah dan akurat.					
8. Pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi komputerisasi adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan bagi staf pengelola.					
9. Staf di unit kerja terkait telah memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi sistem perangkat lunak akuntansi akrual (SIPKD).					
10. Jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur dan tepat pada waktunya.					

d. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	1	2	3	4	5
1. PPK-SKPD beserta Bendahara memahami tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan saling berkoordinasi dengan baik.					
2. Staf pengelola keuangan mengetahui dan memahami peraturan- peraturan keuangan yang terkait.					
3. Selaku pengelola keuangan, anda memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan sistem, mengikuti serta menguasai perkembangan aplikasi yang ada.					

4. Bpk/Ibu pernah mengikuti Pelatihan-pelatihan atau Bimtek keuangan sehingga meningkatkan kemampuan anda dalam bekerja.					
5. Rotasi atau perputaran posisi kerja pengelolaan keuangan diperlukan untuk mengembangkan kemampuan bekerja dan menempatkan pegawai sesuai bidangnya.					
6. Staf Pengelola Keuangan harus berlatar belakang Akuntansi.					
7. Bpk/Ibu membutuhkan perhatian dan penghargaan (<i>reward and appreciation</i>) untuk menyelesaikan segala aktivitas pengelolaan keuangan.					
8. Bpk/Ibu memiliki loyalitas dalam melaksanakan SAP berbasis akrual, bekerja keras, dan disiplin dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan SAP berbasis akrual.					

e. Accrual Basis

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	1	2	3	4	5
1. Bpk/Ibu memahami basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.					
2. Bpk/Ibu memahami laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).					
3. Bpk/Ibu paham bahwa Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (<i>consideration</i>) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.					
4. Bpk/Ibu paham bahwa Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.					

5. Sejalan dengan penerapan basis akrual, Bpk/Ibu memahami bahwa aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.					
6. Bpk/Ibu paham unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.					
7. Bapak/ibu paham SAP berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan.					
8. Bapak/ibu paham Aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan akun-akun yang dimaksud telah dicatat sesuai ketentuan SAP 2010.					
9. Bapak/ibu paham bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, dan pendapatan yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan dalam SAP 2010.					
10. Bapak/ibu paham bahwa beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan, dan beban yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan SAP 2010.					

Lampiran 3

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Variabel Komitmen Pelaksana (X1)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Komitmen pelaksana	24,53	6,656	,671	.	,776
komitmen pelaksana	24,69	6,733	,498	.	,798
komitmen pelaksana	25,17	5,000	,559	.	,822
komitmen pelaksana	24,61	6,587	,608	.	,781
komitmen pelaksana	24,58	6,764	,588	.	,786
komitmen pelaksana	24,53	6,656	,671	.	,776
komitmen pelaksana	24,22	6,635	,534	.	,792

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,813	,844	7

2. Variabel Pengembangan Regulasi (X2)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Regulasi	15,75	3,964	,653	,582	,807
Regulasi	15,56	3,797	,586	,502	,828
Regulasi	15,89	3,644	,598	,499	,828
Regulasi	15,56	3,625	,820	,743	,762
Regulasi	15,47	4,256	,626	,563	,817

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,841	,849	5

3. Variabel Sistem Informasi (X3)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IT	37,06	13,883	,625	,769	,895
IT	37,08	13,564	,762	,711	,888
IT	37,17	12,771	,585	,742	,902
IT	36,97	13,513	,741	,768	,889
IT	37,00	13,771	,692	,713	,892
IT	36,97	13,742	,588	,544	,897
IT	37,03	14,199	,719	,857	,893
IT	37,06	12,968	,719	,715	,889
IT	37,06	13,883	,625	,794	,895
IT	37,36	11,894	,729	,703	,891

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,903	,913	10

4. Variabel Sumber Daya Manusia (X4)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SDM	28,44	6,197	,641	.	,762
SDM	28,53	6,199	,729	.	,755
SDM	28,64	6,352	,572	.	,771
SDM	28,61	5,730	,725	.	,745
SDM	28,72	6,378	,377	.	,801
SDM	29,22	6,863	,091	.	,876
SDM	28,44	6,197	,641	.	,762
SDM	28,64	5,894	,796	.	,741

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,801	,848	8

5. Variabel Akrua Basis (X5)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Akrual Basis	37,44	10,197	,639	.	,850
Akrual Basis	37,47	10,199	,676	.	,848
Akrual Basis	37,39	9,959	,761	.	,842
Akrual Basis	37,36	9,894	,752	.	,842
Akrual Basis	37,39	9,959	,761	.	,842
Akrual Basis	37,36	10,294	,529	.	,859
Akrual Basis	37,44	10,540	,617	.	,853
Akrual Basis	37,56	10,483	,398	.	,872
Akrual Basis	37,28	10,835	,445	.	,864
Akrual Basis	37,56	9,740	,466	.	,873

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,867	,880	10

Hasil Uji Asumsi Klasik**a. Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*****Variabel Komitmen Pelaksana (X1)****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,71803353
Most Extreme Differences	Absolute	,143
	Positive	,143
	Negative	-,117
Kolmogorov-Smirnov Z		,859
Asymp. Sig. (2-tailed)		,452

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Variabel Regulasi (X2)**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,88715558
Most Extreme Differences	Absolute	,195
	Positive	,195
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		1,173
Asymp. Sig. (2-tailed)		,128

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Variabel Sistem Informasi (X3)**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,19284863
Most Extreme Differences	Absolute	,166
	Positive	,166
	Negative	-,084
Kolmogorov-Smirnov Z		,997
Asymp. Sig. (2-tailed)		,273

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Variabel Sumber Daya Manusia (X4)**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,13197913
Most Extreme Differences	Absolute	,177
	Positive	,177
	Negative	-,174
Kolmogorov-Smirnov Z		1,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,211

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,959	2,000		2,479	,019		
	Komitmen Pelaksana	-,100	,080	-,083	-1,246	,222	,504	1,986
	Regulasi	-,180	,093	-,123	-1,933	,062	,549	1,822
	IT	,744	,071	,854	10,426	,000	,330	3,034
	SDM	,423	,094	,315	4,487	,000	,449	2,225

a. Dependent Variable: Akrua Basis

c. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,965 ^a	,931	,923	,981	1,497

a. Predictors: (Constant), SDM, regulasi, Komitmen pelaksana, sistem informasi

b. Dependent Variable: Akrua Basis

d. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,959	2,000		2,479	,019
	Komitmen pelaksana	-,100	,080	-,083	-1,246	,222
	regulasi	-,180	,093	-,123	-1,933	,062
	sistem informasi	,744	,071	,854	10,426	,000
	SDM	,423	,094	,315	4,487	,000

a. Dependent Variable: Akrua Basis

Hasil Analisis Regresi Berganda

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SDM, regulasi, Komitmen pelaksana, IT	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: AkruaI basis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,965 ^a	,931	,923	,981

a. Predictors: (Constant), SDM, regulasi, Komitmen pelaksana, IT

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	404,937	4	101,234	105,266	,000 ^a
	Residual	29,813	31	,962		
	Total	434,750	35			

a. Predictors: (Constant), SDM, regulasi, Komitmen pelaksana, IT

b. Dependent Variable: AkruaI basis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,959	2,000		2,479	,019
	Komitmen pelaksana	-,100	,080	-,083	-1,246	,222
	regulasi	-,180	,093	-,123	-1,933	,062
	IT	,744	,071	,854	10,426	,000
	SDM	,423	,094	,315	4,487	,000

a. Dependent Variable: AkruaI basis